



Analisis Livabilitas Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Semarang

Lusia Dheanatalie Tifanni Prasetyo

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang, Indonesia

Email : lusiadheanatalietif@gmail.com

Jl. Sidodadi Timur Jalan Dokter Cipto No.24, Karangtempel, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232

Abstract. *Urbanization has triggered major changes in the spatial system, both in urban and rural areas. Semarang Regency as a buffer zone for Semarang City is experiencing growth pressures that cause livability disparities between regions. This study aims to examine the spatial system that supports the livability of urban and rural areas in Semarang Regency. The study uses a qualitative descriptive method based on secondary data analysis from spatial planning documents. The results of the study show that urban areas have relatively higher livability than rural areas, especially in terms of infrastructure and access to public services. However, spatial disparities, limited connectivity, and lack of planning integration are major challenges. A development strategy based on local potential, strengthening of rural-urban connectivity, and increasing community participation are needed to increase livability evenly throughout Semarang Regency.*

Keywords: *Livability, Semarang Regency, Urban Area, Rural Area.*

Abstrak. Urbanisasi telah memicu perubahan besar dalam sistem keruangan, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Kabupaten Semarang sebagai daerah penyangga Kota Semarang mengalami tekanan pertumbuhan yang menyebabkan ketimpangan livabilitas antar wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem keruangan yang mendukung livabilitas kawasan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan subjek wilayah administratif Kabupaten Semarang, dan berbasis pada analisis data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen perencanaan spasial seperti RTRW, RPJMD, dan dokumen kebijakan tata ruang lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa kawasan perkotaan relatif memiliki livabilitas lebih tinggi dibandingkan perdesaan, terutama dalam aspek infrastruktur dan akses layanan publik. Ketimpangan spasial, keterbatasan konektivitas, dan kurangnya integrasi perencanaan menjadi tantangan utama. Diperlukan strategi pengembangan berbasis potensi lokal, penguatan konektivitas desa-kota, dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan livabilitas secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Semarang.

Kata kunci: Livabilitas, Kabupaten Semarang, Perkotaan, Perdesaan.

1. LATAR BELAKANG

Urbanisasi merupakan masalah yang kian melanda Negara Maju maupun Negara Berkembang. Urbanisasi merupakan salah satu permasalahan perkotaan dan pedesaan yang menjadi pilihan dominan bagi penduduk di dunia untuk dihuni, termasuk Indonesia. Perkembangan kota kompleks melibatkan berbagai sektor yang saling berhubungan. Keterkaitan antar ruang dan sektor menjadi sebuah sistem perkotaan. Kondisi ini yang membuat perkembangan kota dan desa menjadi dinamis. Tekanan penduduk yang tinggi dengan lahan yang terbatas menjadi suatu permasalahan bagi perkotaan dan pedesaan. Selain itu, permasalahan lain seperti permukiman, transportasi, penyediaan fasilitas publik, hingga lapangan pekerjaan juga turut muncul. Oleh karena itu, penyediaan sarana prasarana

infrastruktur dan fasilitas pelayanan menjadi hal yang krusial agar suatu kota dapat disebut layak huni (van Kamp et al., 2003).

Perkembangan kota dan wilayah merupakan proses yang kompleks dan saling terkait antar berbagai sektor, baik fisik maupun non-fisik, yang berperan penting dalam menentukan apakah suatu kawasan layak huni atau tidak. Keterkaitan antar ruang dan sektor membentuk suatu sistem perkotaan yang dinamis, di mana idealnya sistem ini mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan penduduknya (Karakoc et al., 2020). Dinamika ini terjadi baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, yang sama-sama menghadapi tekanan seperti pertumbuhan penduduk yang tinggi, keterbatasan lahan, serta tantangan dalam penyediaan permukiman, transportasi, fasilitas publik, dan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, pembangunan wilayah harus dirancang secara terpadu dan berbasis data, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang menekankan pentingnya pengembangan wilayah secara berkeadilan dan berkelanjutan (Bappenas, 2020).

Konsep kota layak huni (*livable city*) menjadi kunci dalam menjawab tantangan tersebut. Kota layak huni adalah lingkungan yang mendukung kehidupan nyaman dan produktif bagi warganya, ditinjau dari berbagai aspek fisik seperti infrastruktur, struktur dan pola ruang, serta aspek non-fisik seperti kondisi sosial dan budaya masyarakat (Wheeler, 2004; Tariq Sheikh & van Ameijde, 2022). Penataan ruang yang memperhatikan potensi lahan dan kemudahan akses menjadi salah satu indikator utama kota yang nyaman ditinggali. Namun, kenyamanan ini dapat terganggu oleh berbagai permasalahan seperti kesenjangan ekonomi, keterbatasan energi, peran serta masyarakat yang minim, dan kerusakan lingkungan (Marvuglia et al., 2020). Permasalahan ini tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga mulai terasa di wilayah pedesaan yang sedang berkembang.

Dengan demikian, diperlukan suatu pendekatan pembangunan perkotaan yang holistik dan berbasis kelayakan huni, termasuk dalam konteks Kabupaten Semarang yang saat ini tengah mengalami tekanan pembangunan wilayah. Perencanaan wilayah harus diarahkan tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Maka perlu dilakukannya kajian kondisi perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Semarang berdasarkan aspek-aspek kota layak huni beserta karakteristik sistem keruangnya. Dalam hal ini, diperlukannya pendekatan keruangan sebagai pendekatan yang menekankan pada eksistensi ruang sehingga dapat membangun perkotaan maupun pedesaan yang livabilitas sehingga dapat mendukung pengembangan dengan pendekatan tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat sekitar (Sayoga, 2024). Penelitian ini

adalah menganalisis perbedaan livabilitas antara kawasan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Semarang, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi pengembangan sistem keruangan yang berbasis pada hasil temuan tersebut guna meningkatkan kualitas hidup di kedua kawasan.

2. TINJUAN PUSTAKA

Livabilitas Perkotaan dan Perdesaan

Livabilitas perkotaan adalah kota yang memungkinkan masyarakatnya untuk hidup dengan nyaman dan aman dalam ruang yang berkepadatan tinggi, bangunan yang rapat, aktivitas social ekonomi non pertanian dengan mobilitas masyarakat yang dinamis (Kovacs-Gyori et al., 2019). Livabilitas perdesaan merujuk pada penciptaan lingkungan perdesaan yang layak huni dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, pengembangan potensi sumberdaya dan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan yang berciri pertanian yang kuat, dan kohesi sosial yang tinggi (Yurui et al., 2020; Zhang, 2022).

Sistem Keruangan dalam Konteks Livabilitias

Sistem Keruangan terbentuk dari beberapa aktivitas dalam ruang atau wilayah tertentu hingga menciptakan interaksi timbal balik dan saling mempengaruhi antara ruang dengan manusia yang menghuni ruang tersebut (Tariq Sheikh & van Ameijde, 2022). Dalam konteks kelayakhunian fungsi permukiman harus terintegrasi dengan baik dengan kawasan pendidikan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pusat kota, kawasan industri, kawasan pariwisata dan lainnya ditunjang pula dengan jaringan infrastruktur yang baik dan lancar serta dukungan regulasi dalam mendukung pengembangan kehidupan masyarakat (Sayoga, 2024, Tariq Sheikh & van Ameijde, 2022; van Kamp et al., 2003). Livabilitas wilayah adalah konsep penataan ruang kawasan yang bertujuan menciptakan lingkungan suatu wilayah yang nyaman, aman, dan layak huni bagi masyarakat dengan penekanan pada kualitas hidup, aksesibilitas, keamanan, dan keteraturan fisik dalam suatu wilayah, baik perkotaan maupun perdesaan.

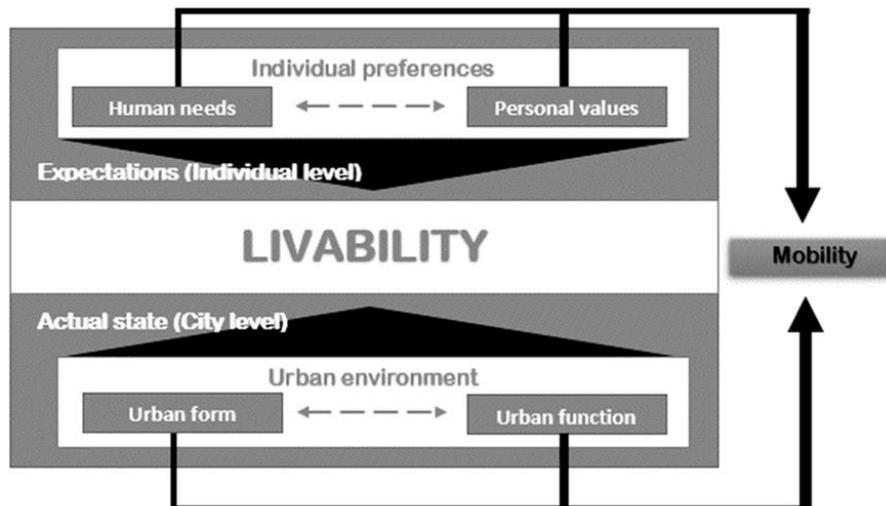
Sistem Keruangan yang Mendukung Livabilitas Perkotaan

Guna mendefinisikan konsep livabilitas, dilakukan kategorisasi terhadap kehidupan perkotaan menjadi tiga komponen utama yang mencerminkan elemen kunci dari hubungan manusia dan lingkungannya (van Kamp, 2003; Kovacs-Györi et al., 2019) sebagai berikut:

1. Komponen pertama adalah lingkungan terbangun dan alam beserta infrastrukturnya, yang disebut sebagai “bentuk perkotaan (*urban form*)”.
2. Komponen kedua mencakup berbagai manfaat yang telah disediakan perkotaan guna diakses dan dimanfaatkan oleh penduduknya yang disebut “fungsi perkotaan (*urban fuction*)”, komponen ini juga mencerminkan bagaimana penduduk memanfaatkan lingkungan perkotaan.
3. Komponen ketiga adalah derajat kualitas dari dua komponen sebelumnya, yang disebut sebagai “tingkat layak huni perkotaan (*urban livability*)”, yaitu seberapa baik lingkungan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakatnya berdasarkan sudut pandang subyektifitas masyarakat.

Pada gambar 1 menjelaskan keterkaitan antara bentuk perkotaan (*urban form*), fungsi perkotaan (*urban function*), dan kelayakan huni (*livability*). Bagian atas mewakili ekspektasi, yaitu pandangan masyarakat pada tingkat individu terhadap perbandingan kondisi lingkungan perkotaan dengan harapan yang diinginkan, sedangkan bagian bawah mengandung unsur lingkungan perkotaan sebagai keadaan penilaian eksisting pada tingkat kota (Kovacs-Gyori et al., 2019). Pada bagian preferensi masyarakat, dua elemen utama adalah kebutuhan manusia dan nilai-nilai pribadi atau komunitas yang menentukan tujuan pembangunan dan kapabilitas masyarakat yang menimbulkan tantangan dalam penilaian kelayakan huni karena subjektivitas dan variabilitas yang tinggi. Namun demikian, pendekatan ini mampu merefleksikan aspek-aspek penting kehidupan perkotaan dari perspektif kelompok sosial atau individu yang berbeda.

Pada tingkat kota, kita dapat membedakan bentuk kota dan fungsi kota, tetapi tidak dapat memisahkannya karena terdapat hubungan saling mempengaruhi yang kompleks antar keduanya (Kovacs-Gyori et al., 2019). Bentuk perkotaan merepresentasikan lingkungan fisik, termasuk apa yang dilihat dan dirasakan penduduk pada lingkungan perkotaan, dan fungsi perkotaan menunjukkan bagaimana lingkungan tersebut digunakan atau dapat digunakan. Gambar 1 mengilustrasikan bahwa layak huni/*livability* adalah representasi dari persepsi individu tentang kualitas bentuk dan fungsi perkotaan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka sendiri. Adapun mobilitas adalah salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam konsep layak huni/*livability*. Penekanan tersebut didasari fakta bahwa bahwa aspek-aspek mobilitas memiliki keterkaitan dengan semua elemen kelayakan huni. Kebutuhan manusia dan fungsi perkotaan yang tersedia menentukan tujuan pergerakan yang ingin dicapai seseorang, sementara nilai-nilai pribadi dapat mempengaruhi moda transportasi yang dipilih. Selain itu, bentuk perkotaan juga mempengaruhi rute aktual mobilitas yang disesuaikan dengan infrastrukturnya.



Sumber: Kovacs-Gyori, 2019

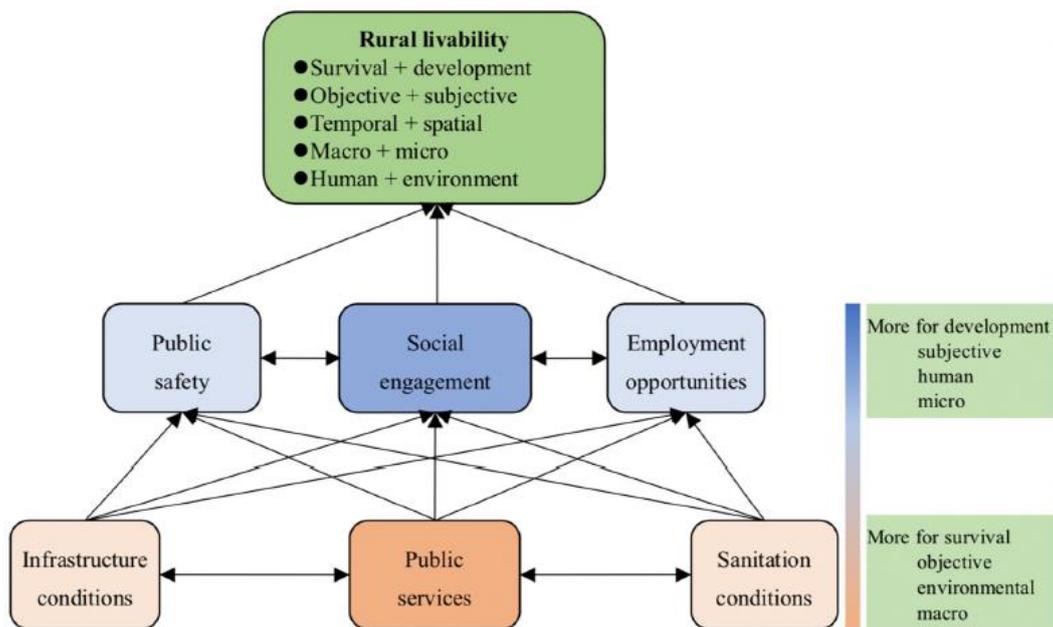
Gambar 1. Konsep Layak Huni Perkotaan

Selain konsep atau pendekatan layak huni/*livability*, terdapat juga variabel-variabel keruangan yang diusulkan untuk menilai tingkat layak huni/*livability* dari perkotaan (Benita et al., 2020), yaitu: transportasi publik, infrastruktur perkotaan, fasilitas komunitas/masyarakat, ruang terbuka dan ruang publik, fasilitas kesehatan, kultur dan lingkungan, pendidikan, serta ketenagakerjaan. Penilaian terhadap variabel-variabel tersebut didasari oleh 2 (dua) komponen, yaitu penilaian terhadap masing-masing variabel berdasarkan standar yang berlaku serta perspektif masyarakat terhadap variabel-variabel tersebut (Benita et al., 2020). Penilaian variabel berdasarkan standar merupakan perbandingan dari kondisi aktual dari tiap variabel terhadap ukuran kuantitas dan kualitas minimal yang harus dimiliki oleh perkotaan dalam menunjang kegiatan dan kebutuhan masyarakatnya. Adapun penilaian variabel berdasarkan perspektif masyarakat merupakan perbandingan kondisi aktual dari masing-masing variabel terhadap keinginan, harapan dan preferensi dari masyarakat terhadap lingkungan perkotaan yang mereka huni (Benita et al., 2020; Kovacs-Gyori et al., 2019).

Berdasarkan kriteria dan konsep yang ada maka permukiman yang berlokasi pada pusat kota berpotensi untuk memiliki nilai layak huni/*livability* yang lebih tinggi dibanding kawasan lainnya (Saitluanga, 2013; Benita et al., 2020). Lokasi memiliki pengaruh signifikan dalam pola ruang yang layak huni tetapi beberapa lingkungan tidak dapat menerjemahkan keuntungan lokasi mereka yang diantaranya disebabkan oleh topografi yang tidak sesuai dan infra-struktur yang tidak memadai sehingga mengakibatkan perbedaan tingkat kelayakan huni antarkawasan (Sayoga, 2024; Tariq Sheikh & van Ameijde, 2022; van Kamp et al., 2003). Maka dari itu dalam penciptaan sistem keruangan perkotaan yang layak huni harus memperhatikan bentuk kota, fungsi kota dan preferensi masyarakat dalam pembangunannya.

Sistem keruangan yang mendukung livabilitas pedesaan

Pengembangan Sistem pertanian yang berdaya dukung tidak dapat dilepaskan dari aktivitas pertanian, dan implikasi dari peningkatan produksi pertanian akan meningkatkan agregat pendapatan wilayah pedesaan sehingga akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat pedesaan (Wei et al., 2023). Karena selain pendapatan yang meningkat, para petani mulai mengkonsumsi lebih banyak bahan makanan, khususnya yang memiliki nutrisi tinggi dalam bentuk biji-bijian berkualitas tinggi, telur, susu, buah-buahan dan sebagainya, sehingga surplus hasil pertanian yang semakin meningkat akan meningkatkan konsumsi barang berkualitas, meningkatnya pendapatan dan berdampak pada peningkatan standar kehidupan masyarakat pedesaan (Sayoga, 2023; Yurui et al., 2020).



Sumber: Yurui et al., 2020.

Gambar 2. Dimensi dalam Livabilitas Pedesaan

Dalam lingkup keruangan desa perlu dibentuk sebuah sistem keruangan yang dapat menjaga livabilitas kawasan pedesaan. Untuk mengukur livabilitas pedesaan sampai saat ini belum ada standar yang baku, namun secara harfiah, aspek livabilitas pedesaan tidak akan jauh berbeda dengan menentukan faktor-faktor yang menentukan livabilitas perkotaan. Oleh Yurui et al., (2020), telah dipetakan beberapa faktor yang menentukan livabilitas pedesaan yang didasarkan dari penelitian yang dilakukan di China. Adapun livabilitas pedesaan menurut Yurui et al., (2020) livabilitas pedesaan dibentuk oleh 6 dimensi, yaitu tingkat keamanan, keterlibatan sosial warga, kesempatan berusaha dan bekerja, infrastruktur, pelayanan publik dan kondisi sanitasi (Yurui et al., 2020) yang dapat dilihat pada gambar 2.

Dari keenam aspek tersebut, untuk proses pengembangan kawasan perdesaan yang layak huni harus diperkuat 3 (tiga) faktor utama yang merupakan *basic needs* livabilitas perdesaan karena fungsinya untuk mempertahankan eksistensi perdesaan itu sendiri (Yurui et al., 2020), seperti kondisi infrastruktur dan sanitasi serta ketersediaan layanan publik karena jika tanpa ketiga aspek tersebut maka kawasan perdesaan tidak akan memiliki daya dukung untuk mempertahankan warganya dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahterannya, sehingga migrasi penduduk perdesaan ke kawasan perkotaan tidak dapat dibendung (Alemu, 2023; Wei et al, 2023; Yurui et al., 2020). Tiga faktor lainnya, yaitu keamanan, keterlibatan dan kesempatan berusaha karena pembangunan perdesaan erat kaitannya dengan peningkatan perekonomian masyarakat perdesaan (Alemu, 2023; Li et al, 2021; Sayoga, 2020; Wei et al, 2023). Dari masing-masing dimensi dapat dijabarkan parameter-parameter dari keenam dimensi yang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Parameter Kondisi Ideal dari 6 Dimensi Livabilitas Perdesaan

Dimensi Livabilitas Perdesaan	Kondisi Ideal setiap Dimensi
Kualitas Lingkungan	kualitas jalan dan kondisi lalu lintas yang baik, pemandangan pedesaan yang indah dan menyenangkan, tempat perbelanjaan yang nyaman, pasokan energi bersih yang nyaman.
Tingkat layanan publik	fasilitas dan layanan medis yang baik, layanan pensiun yang baik, layanan pendidikan yang baik, fasilitas kebugaran yang baik.
Kondisi sanitasi	keamanan air minum, moda pengolahan limbah domestik yang baik, moda pengolahan limbah domestik yang baik, toilet atau fasilitas sanitasi yang cukup memadai, penyediaan air panas dan penghangat (khusus di kawasan utara China yang dingin).
Kondisi keamanan lingkungan	Kondisi air/udara/tanah yang aman, keseharian masyarakat yang aman, angka kejahatan yang rendah.
Kesempatan berusaha	Daya dukung yang tinggi untuk aglomerasi penduduk, kesempatan kerja yang cukup, upah yang kompetitif.
Partisipasi Masyarakat	tingkat partisipasi publik yang tinggi, kemampuan yang baik untuk manajemen urusan publik, kegiatan budaya rekreasi yang kaya dan berkembang.

Sumber: Yurui et al., 2020.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana pendekatan penelitian ini merupakan kegiatan pengungkapan peristiwa atau pengalaman responden dengan interpretasi yang minimal, tetap dekat dengan data dan makna eksplisit responden (Grodal et al., 2020). Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara detail dan mendalam

tentang suatu fenomena atau kejadian yang diteliti, dengan menggunakan metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen (Cresswell, 2017; Villamin et al., 2024). Implementasi metode penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara detail tentang suatu fenomena atau kondisi eksisting di suatu wilayah, dalam hal ini Kabupaten Semarang, khususnya dalam keterkaitan dengan livabilitas perdesaan dan perkotaan. Penelitian kualitatif ini mengikuti kaidah-kaidah utama, yaitu dilakukan secara naturalistik dalam konteks asli tanpa manipulasi variabel, menggunakan pendekatan induktif untuk memahami makna dan pola dari data yang diperoleh, serta peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data secara berkelanjutan guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang dikaji (Lim, 2025). Beberapa penekanan dari metode deskriptif kualitatif pada penelitian ini adalah:

1. Fokus pada penggambaran secara detail dan mendalam tentang suatu fenomena terkait dengan livabilitas perdesaan dan perkotaan secara umum yang dirasakan oleh warga masyarakat di Kabupaten Semarang.
2. Pengumpulan data kualitatif seperti wawancara *on site*, observasi, dan analisis dokumen perencanaan ruang dan peraturan perundang-undangan.
3. Analisis data interpretatif untuk memahami makna dan signifikansi dari data yang dikumpulkan dan akan dituangkan dalam hasil dan pembahasan.

Tahapan penyusunan penelitian ini dilakukan dalam beberapa sebagai berikut:

1. Penentuan Tujuan Penelitian dengan cara mendalami fenomena dan kemudian menentukan tujuan penelitian yang spesifik, serta mengidentifikasi masalah yang akan diteliti.
2. Pengumpulan data kualitatif seperti wawancara *on site*, observasi, dan analisis dokumen perencanaan ruang dan peraturan perundang-undangan.
3. Pengolahan Data atas data yang telah dikumpulkan, seperti transkripsi wawancara dan pengelompokan data yang memiliki kemiripan.
4. Analisis Data dengan mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang terkait dengan fenomena yang diteliti.
5. Interpretasi hasil analisis data, serta mengidentifikasi implikasi dan kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian.
6. Penulisan Laporan secara jelas dan sistematis sesuai dengan pedoman penulisan.

4. HASIL PEMBAHASAN

Interpretasi hasil wawancara on-site pada lokasi penelitian yang dipilih secara acak dipadukan dengan observasi langsung di beberapa titik strategis di ibu kota kecamatan, seperti kawasan permukiman di sekitar pusat kota, permukiman dengan kepadatan tinggi, serta lingkungan sekitar pusat perdagangan dan industri, dilakukan untuk mengukur aspek-aspek livabi-litas perkotaan. Berdasarkan hasil analisis, secara umum tingkat livabilitas perkotaan di Kabupaten Semarang tergolong baik, terutama pada aspek keamanan dan keselamatan yang memperoleh skor tertinggi. Intepretasi hasil penelitian menggu-nakan skoring dengan penilaian bin-tang, dengan menggunakan skala bin-tang 1 hingga 5, di mana bintang 1 menunjukkan kondisi sangat buruk (★) dan bintang 5 menunjukkan kondisi sangat baik (★★★★★). Hasil analisis aspek livabilitas perkotaan di Kabupaten Semarang dapat dilihat di tabel 2.

Tabel 2. Analisis Aspek Livabilitas Perkotaan Eksisting Kabupaten Semarang Dibandingkan Kondisi Ideal Kajian Teori

Aspek Livabilitas Perkotaan	Dasar Teori	Kondisi Eksisting Kabupaten Semarang	Penilaian
Kondisi Infrastruktur	Terjaganya kualitas udara, air dan tanah, tersedianya fasilitas pengeloaan sampah dan limbah secara efektif dan efisien (Kovacs-Gyori et al., 2019)	Telah tersedia beberapa fasilitas pengelolaan sampah, permasalahan masih pada ketidakmerataan seperti belum semua kecamatan memiliki TPS3R. Belum semua warga melakukan pemilahan sampah dari rumah. Kondisi TPA yang telah melebihi kapasitas.	★★★
Ketersediaan Fasilitas Umum	Tersedinya moda transportasi umum, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan rekreasi sesuai kebutuhan masyarakat (Kovacs-Gyori et al., 2019; Searle & Legacy, 2020)	Kemudahan transportasi umum di kawasan permukiman perkotaan, telah terjadi interkoneksi antar moda transportasi, tersedia tempat rekreasi yang banyak dan bervariasi.	★★★★★
Keamanan dan Keselamatan	Kondusivitas perkotaan baik dilihat dari rendahnya tingkat kejahatan, keamanan lalu lintas, dan kesiapsiagaan bencana (Kovacs-Gyori et al., 2019)	Konflik terkait dengan isu SARA tidak banyak terjadi, penguatan mitigasi bencana telah dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa dan keatasnya, sering dilakukan pelatihan bagi para anggota desa tanggap bencana dan kecamatan tanggap bencana.	★★★★★
Kualitas Perumahan	Daya tampung dan daya dukung perkotaan didukung kualitas bangunan, ketersediaan fasilitas dasar, dan kondisi lingkungan yang baik dan nyaman (Tariq Sheikh & van Ameijde, 2022).	Perumahan yang dibangun memiliki kualitas dan kuantitas yang cukup bervariasi, memiliki fasilitas yang memadai, namun beberapa diantaranya ditempatkan di daerah rawan bencana, namun secara umum kualitas perumahan cukup baik dan dapat menyediakan perumahan yang dan permukiman yang layak huni.	★★★★★

Aspek Livabilitas Perkotaan	Dasar Teori	Kondisi Eksisting Kabupaten Semarang	Penilaian
Ketersediaan Ruang Publik	Tersedianya ruang publik, seperti taman, plaza, dan area rekreasi dalam hal kualitas dan kuantitas untuk menjaga kesehatan mental para warga perkotaan (Wheeler, 2004)	Ruang publik tersedia di pusat kota, namun kapasitas masih kecil dan bersifat lokal, belum ada ikon kota yang menjadi pusat ruang publik untuk skala kabupaten. Namun dengan ketersediaan ruang publik cukup memberikan kenyamanan masyarakat sekitar dan meningkatkan kualitas hidup penduduk.	★★★★
Dukungan Fungsi Ekonomi	Dukungan ekonomi perkotaan dilihat dari ketersediaan lapangan kerja, kualitas infrastruktur ekonomi, dan dukungan bagi usaha kecil dan menengah, interkoneksi transportasi dapat meningkatkan daya dukung perkotaan dan sector-sektor ekonomi potensial (Liu et al., 2017; Saitluanga, 2013)	Sektor ekonomi formal berkembang di kawasan perkotaan didukung dari perdagangan besar dan kecil, jasa dan perbengkelan, terdapat sedikit aktivitas pertanian namun tidak signifikan bagi aktivitas masyarakat, pariwisata berkembang sebagai ajang promosi dan pemasaran produk-produk lokal.	★★★★
Partisipasi Masyarakat	Menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di wilayahnya, terjaganya pelaksanaan program pemerintah karena tingginya rasa memiliki masyarakat sekitar (Tariq Sheik & van Ameijde, 2022).	Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan masih berada di lingkup formal, dimana aspirasi masyarakat ditampung dalam kegiatan musrenbang yang berjenjang dari tingkat RT-RW, lingkungan, kecamatan dan kabupaten.	★★★★

Sumber: Hasil Analisis, 2024-2025.

Sedangkan intepretasi hasil wawancara *on site* pada lokasi penelitian secara acak serta dipadukan dengan observasi yang dilakukan di kawasan permukiman di wilayah perdesaan yang menjadi pusat pengembangan pertanian dan spot fasilitas umum, sarana pendidikan dan pertanian di perdesaan serta daerah pertanian di perkampungan untuk mengukur aspek livabilitas perdesaan. Dari hasil intepretasi analisis yang dilakukan secara umum livabilitas perdesaan di Kabupaten Semarang rata-rata baik (★★★★), terlebih pada aspek kesempatan berusaha. Hasil analisis aspek livabilitas perdesaan di Kabupaten Semarang dapat dilihat di tabel 3.

Konsep *livability* bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan kota sehingga berdampak pada kondisi lingkungan dan suasana yang memberi rasa nyaman bagi penghuninya untuk tinggal dan melakukan berbagai aktivitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa livabilitas di Kabupaten Semarang dipengaruhi oleh integrasi fungsi permukiman dengan kawasan pendidikan, perdagangan, industri, dan pariwisata yang masih perlu ditingkatkan. Potensi besar di sektor pariwisata dan pertanian belum sepenuhnya didukung oleh infrastruktur dan regulasi yang memadai. Selain itu, faktor lokasi dan topografi memengaruhi perbedaan tingkat

kelayakhunian antar kawasan, sehingga menyebabkan ketidak-merataan perkembangan di wilayah perko-taan dan perdesaan. Oleh karena itu, stra-tegi pengembangan sistem keruangan yang berfokus pada peningkatan infrastruktur dan pemerataan pembangunan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan livabilitas di Kabupaten Semarang.

Tabel 3. Hasil Analisis Aspek Livabilitas Perdesaan Eksisting Kabupaten Semarang Dibandingkan Kondisi Ideal sesuai Kajian Teori

Dimensi Livabilitas Perdesaan	Dasar Teori	Kondisi Eksisting Kabupaten Semarang	Penilaian
Kualitas Lingkungan	kualitas jalan dan kondisi lalu lintas yang baik, pemandangan pedesaan yang indah dan menyenangkan, tempat perbelanjaan yang nyaman, pasokan energi bersih yang nyaman (Yurui et al., 2020)	Sebagian besar jalan poros desa telah diaspal dengan kondisi yang bervariasi, termasuk beberapa ruas jalan pertanian yang menjadi pusat pengembangan sektor pertanian seperti di Kecamatan Sumowono, Getasan, Jambu. Pasar lokal tersedia di semua kecamatan, namun memiliki jam operasional yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan pasar di perkotaan.	★★★★
Tingkat layanan publik	fasilitas dan layanan medis yang baik, layanan pensiun yang baik, layanan pendidikan yang baik, fasilitas kebugaran yang baik (Yurui et al., 2020).	Semua desa memiliki bidan desa dan setidaknya 1 Pusat kesehatan desa (PKD) dan semua tenaga kesehatan desa berafiliasi dengan pusat kesehatan setempat. Setidaknya 1 SD terdapat di semua desa. Sebagian desa memiliki lapangan yang dapat diguaigunakan untuk berolahraga dan sebagian desa memiliki gedung serbaguna yang dapat digunakan untuk berolah raga dalam ruangan.	★★★★★
Kondisi sanitasi	keamanan air minum, moda pengolahan limbah domestik yang baik, moda pengolahan limbah domestik yang baik, toilet atau fasilitas sanitasi yang cukup (Yurui et al., 2020)	Kondisi sanitasi masih belum merata, namun sudah hamper seluruh warga memiliki jamban, sehingga tidak lagi mencemari sungai. Beberapa wilayah perdesaan yang mendapatkan intervensi pemerintah dibangun WC umum yang disambungkan dengan IPAL komunal dan dapat dimanfaatkan untuk menjadi biogas.	★★★★★
Kondisi keamanan lingkungan	Kondisi air/udara/tanah yang aman, keseharian masyarakat yang aman, angka kejahatan yang rendah (Yurui et al., 2020)	Kondisi lingkungan masih terjaga sehingga tersesan asri, sejuk dan tidak terlalu panas. Hanya di beberapa perdesaan yang berlokasi di dekat pabrik beberapa kali mengalami masalah polusi udara dan air. Namun saat mulai banyak terbentuk paguyuban pecinta lingkungan yang ikut membantu menjaga kelestarian lingkungan.	★★★★★
Kesempatan berusaha	Daya dukung yang tinggi untuk aglomerasi penduduk, kesempatan kerja yang cukup, upah yang kompetitif (Yurui et al, 2020)	Tren yang terjadi di wilayah perdeaan menunjukkan semakin sulitnya mencari tenaga kerja yang bergerak di bidang pertanian, dimana ditunjukkan dari para warga kesulitan mencari tenaga kerja saat musim tanam dan musim panen. Kondisi sosioekonomi warga masyarakat perdesaan tidak banyak yang mengalami miskin ekstem, dan cukup terbantu dengan adanya intervensi pemerintah seperti bantuan sosial sebagai stimulus pengurangan kerawanan	★★★★★

Dimensi Livabilitas Perdesaan	Dasar Teori	Kondisi Eksisting Kabupaten Semarang	Penilaian
		ekonomi warga, pembangunan rumah tidak layak huni, bantuan beasiswa, dll.	
Partisipasi Masyarakat	tingkat partisipasi publik yang tinggi, kemampuan yang baik untuk manajemen urusan publik, kegiatan budaya rekreasi yang kaya dan berkembang (Yurui et al., 2020).	Pemanfaatan pertemuan rutin di tingkat terkecil (RT) dan desa dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah perdesaannya. Kegiatan pertemuan di level yang lebih tinggi tidak terlalu sering kecuali jika ada sosialisasi program pemerintah seperti menjadi proyek strategis nasional, pembentukan koperasi merah putih, dan lain sebagainya.	★★★★

Sumber: Hasil Analisis, 2024-2025.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kawasan perkotaan di Kabupaten Semarang memiliki kelayakan huni yang relatif lebih tinggi dibandingkan kawasan perdesaan, terutama dalam hal infrastruktur dan akses terhadap layanan publik. Namun, tantangan seperti kesenjangan spasial, keterbatasan konektivitas, dan kurangnya integrasi perencanaan masih ada. Kawasan perdesaan secara umum memiliki kelayakan huni yang baik, terutama dalam hal peluang usaha. Namun, masalah seperti kondisi sanitasi yang tidak merata, keterbatasan infrastruktur, dan tantangan dalam ketersediaan tenaga kerja pertanian memengaruhi kelayakan huni pedesaan. Integrasi fungsi permukiman dengan kawasan pendidikan, perdagangan, industri, dan pariwisata di Kabupaten Semarang perlu ditingkatkan. Ketimpangan pembangunan antara kawasan perkotaan dan perdesaan dipengaruhi oleh faktor lokasi dan topografi. Sektor pariwisata dan pertanian di Kabupaten Semarang memiliki potensi yang besar tetapi belum sepenuhnya didukung oleh infrastruktur dan regulasi yang memadai. Strategi pembangunan sistem spasial yang berfokus pada peningkatan infrastruktur, penguatan konektivitas pedesaan-perkotaan, dan pembangunan yang adil sangat penting untuk meningkatkan kelayakan hidup di seluruh wilayah. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan diformalkan tetapi perlu diperkuat untuk memastikan inklusivitas dan efektivitas dalam mengatasi tantangan kelayakan hidup di Kabupaten Semarang.

Saran

Saran yang dapat kami sampaikan untuk upaya penelitian serupa di kemudian hari adalah:

1. Dapat dilakukan penelitian yang lebih memanfaatkan teknologi, khususnya dengan sistem informasi geografis yang dapat digunakan untuk menentukan livabilitas perkotaan dan perdesaan dilihat dari perkembangan ruang dari waktu ke waktu sehingga dapat dilakukan analisis tren dan selanjutnya dilakukan analisis proyeksi. Selain itu, hasil analisis spasial tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pemerataan pembangunan, khususnya pada wilayah yang teridentifikasi memiliki skor livabilitas rendah.
2. Perlunya penelitian livabilitas perkotaan dan perdesaan yang lebih mendalam pada regulasi tata ruang dan strategi pengembangannya, terutama dalam mengevaluasi efektivitas rencana tata ruang yang telah ada dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi dinas terkait dalam meninjau ulang kebijakan pemanfaatan ruang.

Perlunya penelitian yang mendalam kualitas lingkungan di perkotaan dan perdesaan, termasuk kualitas udara, air, tanah, bebatuan dan kerawanan bencana, yang merupakan faktor penting dalam menentukan kelayakhunian suatu wilayah. Hal ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Lingkungan Hidup maupun Dinas PUPR Kabupaten Semarang dalam menetapkan skala prioritas penanganan kawasan yang rawan atau tidak layak huni.

DAFTAR PUSTAKA

- Alemu, F. M. (2023). Measuring the intensity of rural livelihood diversification strategies, and its impacts on rural households' welfare: Evidence from South Gondar zone, Amahara Regional State, Ethiopia. *MethodsX*, 10, 102191.
- Bappenas. (2020). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020–2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Benita, F., Kalashnikov, V., & Tunçer, B. (2020). A spatial livability index for dense urban centers. *Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science*. <https://doi.org/10.1177/2399808320960156>
- Creswell, J. W. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Grodal, S., Anteby, M., & Holm, A. L. (2020). Achieving rigor in qualitative analysis: The role of active categorization in theory building. *Academy of Management Review*. <https://doi.org/10.5465/amr.2018.0482>

- Karakoc, D. B., Barker, K., Zobel, C. W., & Almoghathawi, Y. (2020). Social vulnerability and equity perspectives on interdependent infrastructure network component importance. *Sustainable Cities and Society*, 57, 102072.
- Kovacs-Györi, A., Cabrera-Barona, P., Resch, B., Mehaffy, M., & Blaschke, T. (2019). Assessing and representing livability through the analysis of residential preference. *Sustainability*, 11(18), 4934.
- Li, X., Yang, H., Jia, J., Shen, Y., & Liu, J. (2021). Index system of sustainable rural development based on the concept of ecological livability. *Environmental Impact Assessment Review*, 86, 106478.
- Lim, W. M. (2025). What is qualitative research? An overview and guidelines. *Australasian Marketing Journal*, 33(2), 199–229.
- Liu, J., Nijkamp, P., Huang, X., & Lin, D. (2017). Urban livability and tourism development in China: Analysis of sustainable development by means of spatial panel data. *Habitat International*, 68, 99–107. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2017.02.005>
- Marvuglia, A., Havinga, L., Heidrich, O., Fonseca, J., Gaitani, N., & Reckien, D. (2020). Advances and challenges in assessing urban sustainability: An advanced bibliometric review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 124, 109788.
- Saitluanga, B. L. (2013). Spatial pattern of urban livability in Himalayan region: A case of Aizawl City, India. *Social Indicators Research*, 117(2), 541–559.
- Sayoga, A. A. H. E. (2020). Strategi peningkatan daya saing ekonomi Kecamatan Jambu melalui pengembangan potensi agrobisnis. *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang*, 2(1), 100–115.
- Sayoga, A. A. H. E. (2024). Pengembangan Kecamatan Tenggara berkelanjutan dengan pendekatan urban fringe development dan sustainable small town planning. *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang*, 6(1), 103–114.
- Searle, G., & Legacy, C. (2020). Locating the public interest in mega infrastructure planning: The case of Sydney's WestConnex. *Urban Studies*. <https://doi.org/10.1177/0042098020927836>
- Sheikh, W. T., & van Ameijde, J. (2022). Promoting livability through urban planning: A comprehensive framework based on the "Theory of Human Needs." *SSRN*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4004703>
- Van Kamp, I., Leidelmeijer, K., & Marsman, G. (2003). Urban environmental quality and human well-being: Towards a conceptual framework and demarcation of concepts; a literature study. *Landscape and Urban Planning*, 65, 5–18.
- Villamin, P., Lopez, V., Thapa, D. K., & Cleary, M. (2024). A worked example of qualitative descriptive design: A step-by-step guide for novice and early career researchers. *Journal of Advanced Nursing*. <https://doi.org/10.1111/jan.16034>

- Wei, K., Wang, W., & Fahad, S. (2023). Spatial and temporal characteristics of rural livability and its influencing factors: Implications for the development of rural revitalization strategy. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(17), 49162–49179.
- Wheeler, S. M. (2004). *Planning for sustainability: Creating livable, equitable, and ecological communities* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203300565>
- Yurui, L., Luyin, Q., Qianyi, W., & Karácsonyi, D. (2020). Towards the evaluation of rural livability in China: Theoretical framework and empirical case study. *Habitat International*, 105, 102241.